

Daftar Isi

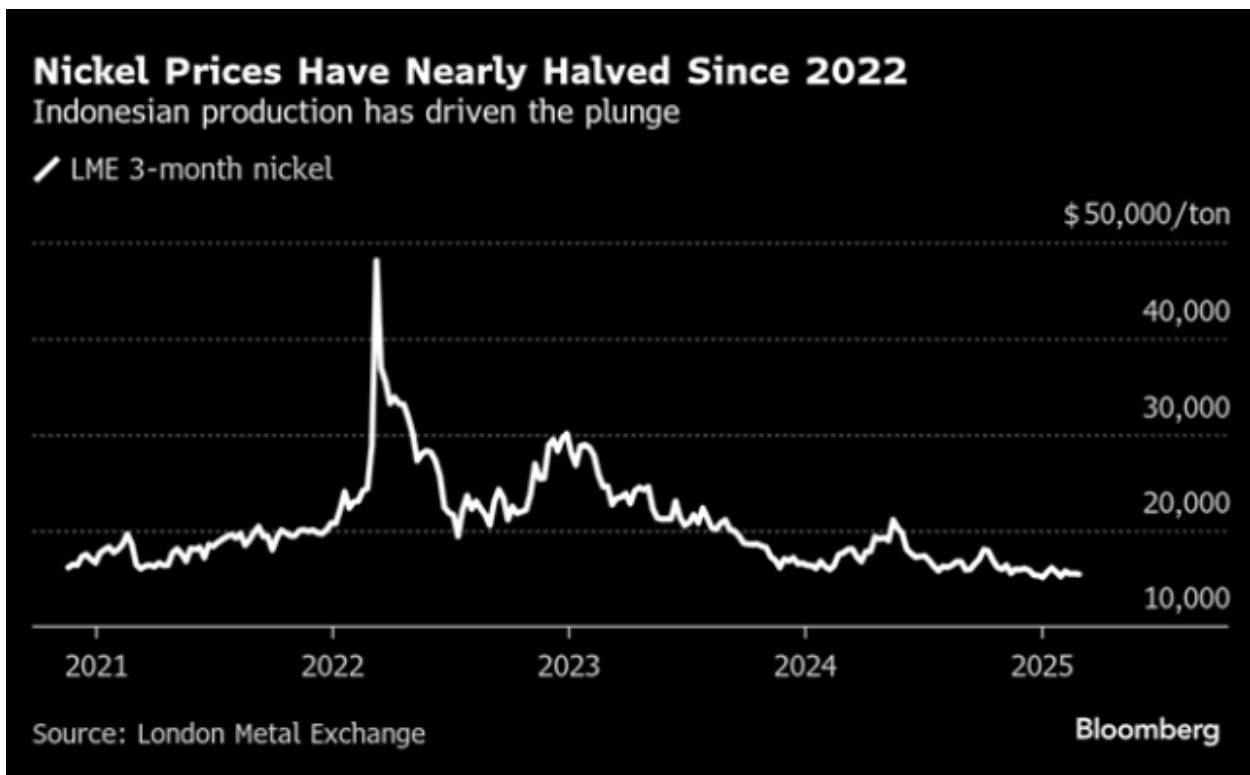
No.	Judul Berita	Media Sumber	Page
1.	Nikel Kian Terpelanting, Industri Smelter RKEF Berisiko Tumbang	bloombergtechnoz.com	2
2.	Ini Proyek Hilirisasi Yang Jadi Prioritas KESDM Untuk Ketahanan Energi Nasional	tambang.co.id	5
3.	Buyer Batu Bara dari China Berpotensi Batalkan Kontrak Imbas Aturan HBA	ekonomi.bisnis.com	7
4.	Freeport Dapat Perpanjangan Ekspor Konsentrat Sampai Juni 2025, Ini Penjelasan ESDM	industri.kontan.co.id	9
5.	Koperasi Bisa Kelola Tambang, Menkop: Akan Diseleksi	ekonomi.republika.co.id	11

Nikel Kian Terpelanting, Industri Smelter RKEF Berisiko Tumbang

INDUSTRI *smelter* nikel, khususnya jenis pirometalurgi, di Indonesia dinilai berisiko gulung tikar jika kondisi permintaan dan harga tidak kunjung membaik. Terlebih, pemain di sektor ini dianggap sudah terlalu jenuh atau *saturated*.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Habib mengatakan gelombang penutupan *smelter* nikel di Tanah Air sangat mungkin terjadi, karena industri ini sangat tergantung pada permintaan global. "Kalau misalnya *global demand*-nya sudah mulai *saturated*, mau tidak mau *smelter* ini terpaksa harus tutup atau misalnya *pivot* ke lini bisnis yang lain untuk mempertahankan operasinya," ujarnya, Kamis (6/3/2025).

Kondisi tersebut diperparah dengan tekanan harga nikel yang terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Akibat harga yang terpelanting, kata Habib produksi di industri pengolahan terpaksa harus dibatasi.



Penurunan harga nikel sejak 2022./dok. Bloomberg

Harga nikel anjlok ke level terendah sejak mencapai rekor tertingginya pada 2020. Per Rabu (5/3/2025), nikel di London Metal Exchange (LME) dilego di harga US\$15.901/ton, turun 0,51% dari hari sebelumnya.

“Jadi setiap *smelter* membatasi juga produksi-produksinya, ataupun kalau misalnya memang ternyata memproduksi, dia tidak bisa mendapatkan harga yang kompetitif atau harga yang dibayangkan. *Kenapa?* Lagi-lagi karena Indonesia terlalu banyak *smelter*-nya, sedangkan *global demand*-nya itu *enggak* diperhitungkan dengan baik.”

Faktor Domestik

Selain faktor harga dan permintaan global, risiko gulung tikar industri *smelter* nikel juga dipengaruhi oleh faktor domestik. Habib menilai kebijakan hilirisasi industri nikel yang berbanding lurus dengan gencarnya investasi *smelter* pirometalurgi tidak diimbangi dengan kalkulasi permintaan domestik.

“Kan Indonesia ini memaksa dahulu, *pokoknya* hilirisasi dahulu, tetapi kita tidak melihat *domestic demand*-nya ada atau tidak. Tidak berapa lama sejak investasi, apakah *smelter-smelter* itu bisa menjawab atau tidak terhadap permintaan domestik dan global?”

Belajar dari hal tersebut, Habib menyarankan agar pemerintah ke depannya lebih berhati-hati dan cermat dalam merumuskan peta jalan penghiliran, termasuk untuk sektor industri pengolahan nikel.

Pemerintah, lanjutnya, harus benar-benar memperhatikan pangsa pasar atau permintaan domestik dan global serta jangka waktunya sebelum memaksakan lebih banyak pabrik pengolahan didirikan di dalam negeri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhir 2024 mendata Indonesia memiliki 190 proyek *smelter* nikel; terdiri dari 54 yang sudah beroperasi, 120 yang sedang tahap konstruksi, dan 16 dalam tahap perencanaan.

Dari 190 proyek tersebut, hanya 8 atau 9 *smelter* yang memiliki teknologi berbasis hidrometalurgi atau *high pressure acid leaching* (HPAL) yang bisa memproduksi bahan baku baterai, sedangkan sisanya berbasis pirometalurgi atau *rotary kiln-electric furnace* (RKEF) untuk memproduksi bahan baku baja nirkarat.

Proyeksi kebutuhan bijih nikel berada pada level 200.000 ton untuk 54 *smelter* yang sudah beroperasi, padahal cadangan eksisting nikel Indonesia saat ini adalah sekitar 5,3 miliar ton.

Dengan asumsi 190 *smelter* bakal beroperasi dan kebutuhan bijih nikel bakal meningkat tiga kali lipat, Kementerian ESDM memproyeksikan industri nikel berisiko selesai 4—5 tahun ke depan bila tidak ada tambahan cadangan.

Bloomberg melaporkan beberapa *smelter* yang lebih kecil di Jawa telah memangkas produksi ke tingkat minimum atau berhenti sama sekali. Pabrik-pabrik tersebut, ratusan mil dari pusat penambangan nikel di Sulawesi, menghadapi biaya tambahan untuk mengirim bijih.

Tidak hanya itu, *smelter* yang berada di areal pertambangan nikel Indonesia juga menghadapi kesulitan, termasuk smelter Nickel Industries Ltd yang ada di kawasan industri Morowali dan dijalankan oleh Tsingshan Holding Group Co asal China tetapi terdaftar di Australia.

Beberapa pabrik peleburan di kawasan milik konglomerat itu dilaporkan membukukan kerugian setahun penuh setelah mengalami penurunan nilai pascapajak sebesar US\$205 juta. Keadaan saat ini sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu, ketika Indonesia melarang ekspor bijih dan memberikan perusahaan-perusahaan keringanan pajak untuk membangun industri peleburan dalam negeri.

“Sebelumnya semua orang mendapatkan pengembalian modal dalam waktu dua tahun atas investasi *smelter* mereka,” kata Jim Lennon, analis logam veteran di Macquarie Group Ltd. “Saat ini, industri tersebut tidak punya uang untuk mereka.” -- *Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi (red/wdh)*

Sumber: [bloombergtechnoz.com](https://www.bloombergtechnoz.com)

Ini Proyek Hilirisasi Yang Jadi Prioritas KESDM Untuk Ketahanan Energi Nasional

PRESIDEN Prabowo Subianto terus mendorong hilirisasi sebagai strategi utama memperkuat ketahanan energi nasional. Di sektor mineral dan batubara (minerba), Kementerian ESDM akan mempercepat pembangunan industri DME untuk substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Proyek ini direncanakan akan dibangun secara paralel di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

“Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batubara *low-calorie* (kalori rendah) sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor (LPG),” terang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menariknya lagi menurut Menteri Bahlil pembangunannya tidak akan lagi bergantung dengan investor luar negeri, melainkan sumber daya dan modal dalam negeri, yang akan dijalankan melalui kebijakan Pemerintah. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina.

“Sekarang kita tidak butuh investor, negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden, memanfaatkan *resource* dalam negeri, yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capexnya semua dari Pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off takernya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini tidak ada lagi yang tergantung kepada pihak lain,” ungkap Bahlil.

Sementara di sektor Migas, Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen mengembangkan industri kilang minyak. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan merancang pembangunan kilang minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, sebagai terobosan untuk memastikan pasokan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.

“Kita juga akan membangun *refinery* (kilang minyak) yang Insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500 ribu barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya, ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik,” ujar Bahlil seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM.

Kilang minyak ini akan dirancang dengan kapasitas 500 ribu barel per hari serta mampu mengolah minyak mentah dari dalam negeri maupun impor. Kilang ini akan memproduksi berbagai produk minyak bumi, termasuk BBM, mencapai 531.500 barel per hari, sehingga dapat memperkuat pasokan energi nasional.

Untuk merealisasikan proyek ini, investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai USD 12,5 miliar. Selain mengurangi ketergantungan pada impor, proyek ini berpotensi menghemat hingga 182,5 juta barel minyak per tahun atau setara USD 16,7 miliar. Tak hanya itu, pembangunan kilang ini juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja, dengan 63.000 tenaga kerja langsung dan 315.000 tenaga kerja tidak langsung.

Sebelumnya, Menteri ESDM menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai USD40 miliar. Presiden Prabowo bahkan telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Sumber: tambang.co.id

Buyer Batu Bara dari China Berpotensi Batalan Kontrak Imbas Aturan HBA

PEMBELIAN batu bara dari China berpotensi turun imbas kebijakan kewajiban menggunakan harga batu bara acuan (HBA) sebagai acuan transaksi penjualan emas hitam di pasar global.

Melansir Bloomberg, Kamis (6/3/2025), perusahaan-perusahaan asal Negeri Tirai Bambu merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, harga pada HBA lebih tinggi.

Misalnya, HBA Februari untuk batu bara Indonesia berkualitas tinggi adalah US\$124,24 per ton. Sementara itu, kontrak berjangka batu bara Newcastle Australia di bursa ICE Futures Europe untuk Februari rata-rata dipatok US\$105 per ton.

Konsultan yang berbasis di China, Fenwei Energy Information Service Co, dalam catatannya menyebut beberapa perusahaan berusaha untuk membatalkan atau merundingkan ulang kontrak jangka panjang dengan Indonesia.

Senada, Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China juga menyebut HBA membuat harga emas hitam asal RI melambung. Hal ini dapat menghapus keuntungan perdagangan dan menghambat pembelian dari pembeli di China.

Fenomena penolakan penerapan HBA dari perusahaan China itu juga diamini oleh Indonesian Mining Association (IMA). Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengaku pihaknya mendengar keberatan dari buyer batu bara RI. Ini khususnya buyer dari China.

Mereka, kata Hendra, keberatan lantaran HBA lebih tinggi dibandingkan indeks harga batu bara lainnya.

"Ya, kami mendengar keberatan dari pihak buyer terkait dengan rencana penerapan HBA. Saya kebetulan 27 Februari lalu hadir di acara 2nd China Coal Import International Summit di kota Guangzhou dan banyak pertanyaan dari pihak buyer terkait hal itu," kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (4/3/2025).

Selama ini, kebanyakan pembeli batu bara dari Indonesia mengacu pada Indonesia Coal Index (ICI). Indeks harga ini merupakan acuan harga mingguan batu bara Indonesia di pasar domestik dan internasional yang disusun oleh PT Coalindo Energy dan Argus Media, lembaga pricing dari Inggris.

Sementara itu, HBA ditetapkan oleh Kementerian ESDM setiap bulannya (kini akan ditetapkan 2 kali sebulan) dan digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan tarif royalti dan harga jual batu bara.

Hendra pun menyebut para eksportir kini tengah bernegosiasi dengan para buyer terkait kontrak existing. Sebab, kontrak yang sudah terjalin belum mengacu pada HBA.

"Tentu para eksportir sedang menegosiasikan dengan para buyer karena selama ini mereka sudah ada kontrak yang merujuk kepada indeks tertentu," jelas Hendra.

Adapun, kebijakan penggunaan HBA untuk ekspor tersebut diberlakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai 1 Maret 2025. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara.

Beleid ini mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian termasuk pemegang kontrak karya dan pemegang PKP2B, melakukan penjualan batu bara yang diproduksi sesuai harga patokan batu bara (HPB).

HPB yang dihitung menggunakan HBA, menjadi harga batas bawah penjualan batu bara. Penetapan HBA pun kini akan dilakukan dua kali dalam 1 bulan, yakni setiap tanggal 1 dan 15.

Sebelumnya, penetapan HMA dan HBA dilakukan 1 bulan sekali. Aturan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga penjualan komoditas mineral logam dan batu bara di pasar global maupun dalam negeri. Editor : Denis Riantiza Meilanova

Sumber: ekonomi.bisnis.com

Freeport Dapat Perpanjangan Ekspor Konsentrat Sampai Juni 2025, Ini Penjelasan ESDM

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya resmi memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga Juni 2025.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 6 Tahun 2025. Beleid anyar ini sekaligus merevisi Permen ESDM No. 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan kebijakan ini bukanlah bentuk relaksasi ekspor, melainkan langkah untuk mengatasi kondisi kahar (*force majeure*) yang dihadapi Freeport.

Menurutnya, jika ekspor tidak diizinkan, produksi di hulu berisiko terhenti, yang dapat berdampak pada terganggunya operasional dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan.

“Bukan relaksasi, karena kondisi kahar. Ini untuk tetap produksi di dalam negeri itu bisa berlanjut. Kalau ini tidak dilakukan ekspor untuk kondisi kahar, itu justru akan terhenti kegiatan produksi di hulunya. Kalau ini terhenti di hulu berarti akan menghambat proses dan juga ada PHK,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (6/3).

Yuliot menuturkan, perpanjangan ekspor ini hanya berlaku selama enam bulan, sesuai dengan masa berlaku Permen ESDM No. 6 Tahun 2025. Untuk itu, PTFI masih memiliki waktu hingga pertengahan tahun untuk menuntaskan kewajibannya dalam pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) untuk memenuhi ketentuan hilirisasi mineral.

Hingga saat ini, Freeport masih melanjutkan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. Namun pembangunannya sempat terkendala insiden kebakaran yang terjadi pada Oktober tahun lalu. Insiden tersebut mengganggu operasi salah satu unit vital, sehingga operasi smelter tidak dapat dilanjutkan.

Direktur Utama PTFI, Tony Wenas sempat menyatakan akibat terhentinya operasional smelter, PT Smelting di Gresik hanya mampu menyerap sekitar 40% dari total konsentrat tembaga yang dihasilkan Freeport di Papua.

Ada sekitar 400.000 ton konsentrat tembaga tertahan di gudang akibat belum adanya izin ekspor setelah 31 Desember 2024. Rinciannya, sebanyak 200.000 ton tersimpan di gudang Pelabuhan Amamapare, Papua; 140.000 ton berada di fasilitas penyimpanan smelter katoda tembaga di Manyar, Jawa Timur; sementara 60.000 ton lainnya disimpan di gudang PT Smelting.

Sumber: industri.kontan.co.id

Koperasi Bisa Kelola Tambang, Menkop: Akan Diseleksi

MENTERI Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa Kementerian Koperasi akan menyeleksi koperasi-koperasi yang bisa mengelola tambang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar koperasi. Menurutnya, seleksi juga dilakukan untuk mencegah keberadaan koperasi fiktif yang tidak memiliki dasar operasional yang jelas atau hanya dibentuk untuk tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi.

“Misalnya, koperasi harus didirikan minimal 20 orang anggotanya, ada mekanisme rapat anggota tahunan secara rutin,” kata Budi Arie kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Setelah seleksi, Kemenkop selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan memutuskan pemberian izin mengelola tambang. Menyadari bahwa mengelola tambang butuh modal yang besar, Budi Arie mengatakan koperasi bisa bekerja sama dengan dengan koperasi atau pihak lain seperti BUMN dan swasta melalui skema koperasi multipihak.

Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dalam Indonesia Energy Outlook 2025 pada 27 Februari lalu, menyampaikan bahwa hampir 20 koperasi telah mengajukan izin untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Permohonan tersebut datang menyusul pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 18 Februari 2025.

Perubahan keempat UU Minerba itu memungkinkan koperasi untuk mengelola tambang batu bara melalui skema prioritas. Selain koperasi, UU tersebut juga memungkinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola tambang batu bara.

Sumber: Antara

Sumber: ekonomi.republika.co.id